

## PERAN DAN STRATEGI WALHI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KRISIS LINGKUNGAN

Avensius Tumur<sup>1</sup>, Yosep E. Jelahun<sup>2</sup>, Imanta I. Perangin Angin<sup>3</sup>, Aris Lambe<sup>4</sup>  
[avensiustumur@gmail.com](mailto:avensiustumur@gmail.com)<sup>1</sup>, [yosep.jelahun@staf.undana.ac.id](mailto:yosep.jelahun@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>,  
[imanta.perangin.angin@staf.undana.ac.id](mailto:imanta.perangin.angin@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>, [aris.lambe@staf.undana.ac.id](mailto:aris.lambe@staf.undana.ac.id)<sup>4</sup>  
Universitas Nusa Cendana

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan strategi WALHI Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap krisis lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WALHI NTT menjalankan empat peran utama, yaitu konsultasi, fasilitasi, advokasi, dan monitoring. Strategi yang diterapkan meliputi Sekolah Ekologi, Kampanye Maklumat, dan pemberdayaan masyarakat melalui konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Program Sekolah Ekologi efektif membangun pemahaman kritis peserta terhadap isu lingkungan, Kampanye Maklumat memperluas kesadaran publik melalui ruang sosial dan media, sedangkan WKR memperkuat kapasitas masyarakat adat, nelayan, dan komunitas lokal dalam mempertahankan ruang hidup mereka. Implikasi dari peran dan strategi tersebut terlihat pada meningkatnya pengetahuan masyarakat, perubahan perilaku yang lebih peduli lingkungan, keberanian menyuarakan hak ekologis, serta terbentuknya solidaritas kolektif melalui komunitas Sahabat Alam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa WALHI NTT berkontribusi penting dalam membangun masyarakat yang sadar, kritis, dan aktif menjaga kelestarian lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** WALHI, Kesadaran Masyarakat, Krisis Lingkungan, Strategi Lingkungan, NTT.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the roles and strategies of WALHI East Nusa Tenggara (NTT) in improving public awareness of the environmental crisis. A descriptive qualitative approach was employed using interviews, observation, and documentation techniques. The findings show that WALHI NTT performs four main roles: consultation, facilitation, advocacy, and monitoring. The strategies implemented include the Ecological School, Maklumat Campaign, and community empowerment through the People's Managed Territory concept. The Ecological School effectively develops participants' critical understanding of environmental issues, the Maklumat Campaign expands public awareness through social spaces and media, while community empowerment strengthens the capacity of indigenous peoples, fishermen, and local communities to defend their living spaces. The impacts are reflected in increased public knowledge, more environmentally responsible behavior, stronger courage to voice ecological rights, and the formation of collective solidarity through the Sahabat Alam community. This study concludes that WALHI NTT has an important contribution in creating a society that is aware, critical, and active in protecting environmental sustainability.*

**Keywords:** WALHI, Public Awareness, Environmental Crisis, Environmental Strategy, NTT..

### PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang memengaruhi keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat. Lingkungan hidup tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik tempat manusia beraktivitas, melainkan sebagai satu kesatuan antara unsur alam, manusia, serta relasi timbal balik di dalamnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kerusakan

lingkungan tidak semata-mata berkaitan dengan menurunnya kualitas sumber daya alam, tetapi juga berkaitan erat dengan pola tindakan manusia yang kurang memperhatikan prinsip keberlanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009).

Dalam konteks global, meningkatnya frekuensi bencana ekologis, perubahan iklim, degradasi hutan, pencemaran air, dan penumpukan sampah menandakan bahwa daya dukung lingkungan mengalami tekanan serius. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan serupa, terutama karena pembangunan ekonomi sering kali berhadapan dengan kepentingan konservasi. Berbagai kasus banjir, longsor, kebakaran hutan, hingga krisis pengelolaan sampah di wilayah perkotaan memperlihatkan bahwa tata kelola lingkungan belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah lingkungan tidak cukup hanya melalui regulasi negara, tetapi memerlukan keterlibatan aktor non-negara, termasuk organisasi masyarakat sipil. Dalam kerangka ini, keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi penting sebagai penghubung antara masyarakat dan negara dalam mendorong kesadaran ekologis serta advokasi kebijakan publik (Abduh, 2018).

Salah satu organisasi masyarakat sipil yang memiliki rekam jejak kuat dalam isu lingkungan di Indonesia ialah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Sejak berdiri pada tahun 1980, WALHI dikenal konsisten melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan akses ekologis, dan pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan sehat. Sebagai organisasi berbasis jaringan nasional, WALHI memiliki cabang di berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT). Keberadaan WALHI NTT menjadi relevan mengingat provinsi ini menghadapi tantangan ekologis yang kompleks, mulai dari deforestasi, krisis air bersih, alih fungsi lahan, hingga persoalan sampah dan minimnya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan seperti Kota Kupang (Badan Pusat Statistik NTT, 2021).

Di sisi lain, persoalan lingkungan di NTT tidak hanya disebabkan oleh faktor struktural, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya literasi ekologis masyarakat. Hungerford dan Volk (1990) menjelaskan bahwa kesadaran lingkungan dibentuk melalui pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kemauan berpartisipasi dalam penyelesaian masalah. Sejalan dengan itu, Stern (2000) melalui Value-Belief-Norm Theory menegaskan bahwa perilaku pro-lingkungan dipengaruhi oleh nilai personal, keyakinan terhadap dampak kerusakan lingkungan, serta norma moral individu. Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi aspek fundamental dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam situasi ini, WALHI NTT memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi advokasi, tetapi juga pendidikan publik melalui kampanye, sekolah ekologi, diskusi komunitas, dan pengorganisasian masyarakat (Hungerford & Volk, 1990; Stern, 2000).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran WALHI dalam berbagai konteks. Wahyudi, Anugerah, dan Arif menyoroti keterlibatan WALHI dalam politik lingkungan pada kasus kabut asap di Riau melalui strategi advokasi transnasional. Apriandi (2019) menganalisis peran WALHI dalam menolak eksploitasi kawasan karst oleh industri semen di Indonesia. Sementara Simanungkalit (2024) menelaah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan melalui pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa WALHI memiliki kapasitas kuat dalam advokasi dan mobilisasi sosial. Namun demikian, sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek konflik kebijakan, resistensi terhadap industri ekstraktif, atau program kebersihan berbasis komunitas, sedangkan kajian yang secara khusus menelaah strategi WALHI dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap krisis lingkungan pada konteks wilayah kepulauan timur Indonesia masih relatif terbatas (Apriandi, 2019; Simanungkalit, 2024; Wahyudi, 2021).

Kesenjangan kajian tersebut penting dicermati karena karakteristik sosial-ekologis NTT berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Kerentanan iklim, keterbatasan sumber daya air, serta ketimpangan pembangunan menjadikan strategi peningkatan kesadaran lingkungan tidak dapat disamakan dengan daerah lain. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana WALHI NTT merancang peran kelembagaan, strategi edukasi, pola advokasi, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam menghadapi krisis lingkungan di Kota Kupang. Kajian ini juga penting untuk menilai sejauh mana organisasi masyarakat sipil mampu menjadi agen transformasi ekologis di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi WALHI NTT dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap krisis lingkungan di Kota Kupang. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi implikasi dari strategi yang dijalankan WALHI terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai gerakan masyarakat sipil di bidang lingkungan sekaligus menjadi rujukan praktis bagi penguatan kebijakan pendidikan ekologis berbasis komunitas di daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran Program Sekolah Ekologi WALHI Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap krisis lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, serta perubahan perilaku subjek penelitian melalui data deskriptif berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen. Penelitian dilaksanakan di kantor WALHI Kota Kupang dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut aktif menangani isu-isu lingkungan di wilayah NTT. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, terdiri atas pengelola, fasilitator, dan anggota WALHI yang dianggap memahami pelaksanaan program. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam, serta data sekunder yang berasal dari dokumen program, laporan kegiatan, publikasi WALHI, jurnal, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap respons serta partisipasi masyarakat, wawancara mendalam guna memperoleh informasi mengenai tujuan, metode, dan dampak program, serta dokumentasi berupa foto kegiatan dan arsip pendukung lainnya. Analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan/verifikasi untuk memperoleh temuan mengenai efektivitas program WALHI serta implikasinya terhadap peningkatan kesadaran masyarakat di NTT.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran dan Strategi WALHI NTT dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Krisis Lingkungan di Kota Kupang**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota WALHI NTT, penelitian ini menemukan bahwa WALHI NTT menjalankan empat peran utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap krisis lingkungan, yaitu konsultasi, fasilitasi, advokasi, dan monitoring. Keempat peran tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perubahan sosial dan ekologis.

Pertama, peran konsultasi diwujudkan melalui penyediaan fasilitator dan pemateri yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup. Kegiatan konsultasi tidak dilakukan secara satu arah, tetapi melalui ruang

dialog terbuka agar masyarakat dapat menyampaikan persoalan lingkungan yang mereka hadapi. Informan AR menjelaskan bahwa fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi pengalaman sekaligus mendiskusikan solusi yang relevan. Selain itu, WALHI juga melakukan wawancara awal terhadap calon peserta guna memastikan kesiapan, komitmen, dan keseriusan mereka mengikuti program.

Kedua, peran fasilitasi terlihat dari upaya WALHI menciptakan ruang belajar yang inklusif, interaktif, dan berbasis pengalaman. Organisasi ini menyusun modul pembelajaran dengan metode belajar sambil praktik, memanfaatkan alam terbuka sebagai media edukasi, serta membentuk tim pelaksana untuk mendukung kelancaran program. Informan LM menyampaikan bahwa seluruh peserta diperlakukan setara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun status sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa WALHI berupaya membangun suasana belajar yang demokratis sehingga peserta lebih mudah terlibat aktif dalam setiap kegiatan.

Ketiga, peran advokasi dijalankan dengan membangun kesadaran kritis masyarakat agar berani menyuarakan persoalan lingkungan di ruang publik. Informan SW mengungkapkan bahwa setelah mengikuti program WALHI, dirinya terdorong untuk lebih aktif menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam komunitas peduli lingkungan. Selain membangun kapasitas individu, WALHI juga melakukan pendampingan masyarakat dalam berbagai isu strategis, seperti kasus Geothermal Poco Leok di Manggarai, PLTU Timor Satu di Kabupaten Kupang, dan rencana pembangunan pabrik Elpiji di Bolok. Dalam konteks ini, WALHI berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pembuat kebijakan agar kepentingan ekologis tetap diperhatikan.

Keempat, peran monitoring dilakukan melalui evaluasi program secara berkala, pemantauan keterlibatan alumni dalam komunitas Sahabat Alam, serta pengamatan terhadap perubahan perilaku peserta setelah mengikuti kegiatan. Informan AR menjelaskan bahwa evaluasi tahunan dilakukan untuk menilai efektivitas program dan memperbaiki kekurangan pada pelaksanaan berikutnya. Meskipun belum menggunakan indikator kuantitatif yang baku, tingkat partisipasi peserta dan keberlanjutan aktivitas alumni menjadi ukuran utama keberhasilan program.

Temuan ini menunjukkan bahwa WALHI NTT tidak hanya berfungsi sebagai organisasi advokasi lingkungan, tetapi juga sebagai agen pendidikan sosial yang berperan membentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat terhadap krisis lingkungan. Melalui kombinasi konsultasi, fasilitasi, advokasi, dan monitoring, WALHI mampu mendorong tumbuhnya kesadaran ekologis masyarakat secara lebih berkelanjutan.

### **Strategi WALHI NTT dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Krisis Lingkungan di Kota Kupang**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pengurus, anggota, dan alumni WALHI NTT, penelitian ini menemukan bahwa WALHI NTT menerapkan tiga strategi utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap krisis lingkungan, yaitu Sekolah Ekologi, Kampanye Maklumat, dan pemberdayaan masyarakat melalui konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Ketiga strategi tersebut dijalankan secara terpadu untuk membangun pengetahuan, kesadaran kritis, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Pertama, strategi Sekolah Ekologi merupakan program pendidikan lingkungan yang dilaksanakan satu kali setiap tahun selama empat hari dengan sistem menginap. Program ini menggunakan metode Green Student Movement yang menekankan pembelajaran partisipatif dan berbasis pengalaman lapangan. Peserta tidak hanya menerima materi di dalam ruangan, tetapi juga diajak belajar langsung di alam terbuka agar mampu memahami keterkaitan antara teori dan realitas lingkungan. Informan berinisial AR menjelaskan bahwa

metode ini dirancang agar peserta dapat menemukan pola belajar sendiri dan memahami persoalan lingkungan secara lebih mendalam. Materi yang diberikan meliputi sejarah gerakan lingkungan, hak atas lingkungan hidup, perubahan iklim, keadilan gender, dan konservasi dasar. Informan berinisial JA menyampaikan bahwa setelah mengikuti Sekolah Ekologi, dirinya memahami bahwa persoalan lingkungan bukan sekadar masalah sampah, tetapi berkaitan erat dengan relasi manusia dan alam. Setelah program selesai, peserta dihimpun dalam komunitas Sahabat Alam sebagai bentuk keberlanjutan kaderisasi gerakan lingkungan.

Kedua, strategi Kampanye Maklumat dilakukan sebagai upaya memperluas jangkauan edukasi lingkungan kepada masyarakat umum di luar peserta Sekolah Ekologi. Strategi ini dilaksanakan melalui sosialisasi langsung ke kampus, sekolah, ruang publik, serta media digital. WALHI secara rutin mengadakan diskusi publik, podcast lingkungan, lomba menulis, pameran kebencanaan, dan audiensi dengan pemerintah daerah. Selain itu, alumni Sekolah Ekologi didorong menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing melalui pendekatan peer to peer education. Informan berinisial JA menjelaskan bahwa dirinya membagikan pengetahuan lingkungan kepada rekan-rekan kampus dengan mengaitkan isu ekologis pada bidang teknik yang dipelajarinya. Kampanye berbasis aksi juga dilakukan melalui kegiatan Car Free Day, pembagian bibit pohon, ajakan membawa tumbler, serta penanaman mangrove di kawasan pesisir. Informan berinisial DW menegaskan bahwa kampanye ini penting untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Ketiga, strategi pemberdayaan masyarakat melalui konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR) diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mempertahankan ruang hidup dari ancaman eksploitasi. Pendekatan ini difokuskan pada kelompok rentan seperti masyarakat adat dan komunitas nelayan. WALHI mendampingi masyarakat adat Manggarai dalam kasus Geothermal Poco Leok agar memahami hak ekologis mereka dan mampu menyuarakan aspirasi ke tingkat kebijakan. Informan berinisial SW menyatakan bahwa keterlibatannya dalam program WALHI mengubah cara pandangnya mengenai hubungan kekuasaan dan lingkungan serta mendorongnya membela kepentingan masyarakat adat. Pada komunitas nelayan, WALHI juga melakukan pendampingan di wilayah Bolok untuk menjaga ruang tangkap dari ekspansi industri serta mendorong pengawasan publik terhadap AMDAL perusahaan. Selain itu, pemberdayaan dilakukan melalui kolaborasi lintas kampus dan penguatan komunitas Sahabat Alam yang sejak 2016 menjadi ruang gerakan kolektif kaum muda peduli lingkungan.

Temuan ini menunjukkan bahwa strategi WALHI NTT tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran kritis dan penguatan kapasitas masyarakat. Melalui Sekolah Ekologi, Kampanye Maklumat, dan Wilayah Kelola Rakyat, WALHI berhasil membangun model gerakan lingkungan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

### **Adaptasi Strategi WALHI NTT dan Respons terhadap Isu Lingkungan Prioritas di Nusa Tenggara Timur**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa WALHI NTT menerapkan strategi yang adaptif dan kontekstual dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap krisis lingkungan. Penyesuaian strategi dilakukan secara dinamis berdasarkan kebutuhan sosial, karakteristik peserta, serta tingkat urgensi persoalan lingkungan di lapangan. WALHI terlebih dahulu memetakan isu-isu yang paling relevan di masyarakat sebelum menyusun program kerja, sehingga setiap kegiatan memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan nyata yang dihadapi warga. Selain itu, metode pembelajaran dirancang sesuai karakter generasi muda yang cenderung kurang tertarik pada pola pendidikan formal yang kaku, sehingga

pendekatan partisipatif, dialogis, dan berbasis pengalaman lebih diutamakan. WALHI juga bersifat terbuka dengan melibatkan narasumber eksternal yang memiliki keahlian spesifik agar materi yang diberikan lebih beragam dan aplikatif. Evaluasi rutin setiap tahun menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas program sekaligus menyesuaikan strategi baru sesuai perkembangan kondisi masyarakat.

Di samping itu, isu yang diangkat WALHI tidak terbatas pada persoalan lokal, tetapi juga menghubungkan masyarakat dengan isu global seperti perubahan iklim, krisis energi, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Seleksi peserta program secara ketat juga dilakukan agar kegiatan diikuti individu yang memiliki komitmen tinggi sehingga dampak program dapat berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa WALHI tidak menggunakan pendekatan seragam, melainkan menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi sosial dan ekologis masyarakat NTT.

Penyesuaian strategi tersebut tampak jelas dalam penanganan berbagai kasus lingkungan di Nusa Tenggara Timur. Pada kasus Geothermal Poco Leok di Manggarai, WALHI memperkuat peran advokasi dan konsultasi dengan mendampingi masyarakat adat memahami hak ekologis mereka yang terancam oleh proyek panas bumi. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR) digunakan untuk memperkuat posisi tawar warga dalam menyuarakan penolakan terhadap proyek yang dianggap mengganggu ruang hidup mereka.

Pada kasus pencemaran PLTU Timor Satu di Kabupaten Kupang, WALHI menonjolkan fungsi monitoring dan fasilitasi. Organisasi ini melakukan pemantauan terhadap kualitas udara serta dampak kesehatan masyarakat sekitar, kemudian menyebarluaskan temuan tersebut melalui Kampanye Maklumat agar publik mengetahui risiko pencemaran. Melalui langkah ini, WALHI mendorong pemerintah untuk mengevaluasi izin lingkungan perusahaan sekaligus menawarkan transisi menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Dalam kasus pembangunan pabrik Elpiji di Bolok, WALHI menjalankan fungsi konsultasi melalui kritik terhadap dokumen AMDAL dan tata ruang kawasan industri. Strategi pemberdayaan masyarakat diterapkan dengan memperkuat posisi nelayan setempat agar tetap memiliki kedaulatan atas ruang tangkap mereka dari tekanan ekspansi industri. WALHI juga mendorong pengawasan publik terhadap standar operasional perusahaan guna meminimalkan potensi pencemaran lingkungan pesisir.

Sementara itu, pada persoalan sampah di Kota Kupang, WALHI menggunakan pendekatan pendidikan dan perubahan perilaku melalui Sekolah Ekologi serta Kampanye Maklumat. Organisasi ini membentuk relawan muda dalam komunitas Sahabat Alam yang secara rutin melakukan aksi bersih pantai, edukasi pemilahan sampah rumah tangga, serta kampanye pengurangan plastik sekali pakai di ruang publik. Meskipun persoalan sampah belum terselesaikan sepenuhnya karena keterbatasan sistem pengelolaan pemerintah, WALHI dinilai berhasil membangun kesadaran ekologis di tingkat akar rumput.

Untuk memperjelas bentuk penyesuaian strategi serta respons WALHI NTT terhadap berbagai persoalan lingkungan di daerah, hasil temuan penelitian diringkas dalam tabel berikut. Tabel ini memuat isu lingkungan utama yang dihadapi masyarakat, strategi yang diterapkan WALHI NTT, serta dampak atau keluaran yang dihasilkan dari setiap intervensi. Penyajian tabel ini menunjukkan bahwa pendekatan WALHI bersifat fleksibel, kontekstual, dan disesuaikan dengan karakter masing-masing permasalahan lingkungan.

Tabel 1. Penyesuaian Strategi dan Respons WALHI NTT terhadap Permasalahan Lingkungan di Nusa Tenggara Timur

No	Isu Lingkungan	Strategi Utama WALHI NTT	Dampak/Output
1	Geothermal Poco Leok	Advokasi, Konsultasi, WKR	Penguatan masyarakat adat dan advokasi hak ekologis
2	PLTU Timor Satu	Monitoring, Fasilitasi, Kampanye Maklumat	Tekanan publik dan dorongan evaluasi izin
3	Pabrik Bolok Elpiji	Konsultasi, WKR	Penguatan nelayan dan kritik AMDAL
4	Sampah Kupang Kota	Sekolah Ekologi, Kampanye Maklumat	Edukasi publik dan perubahan perilaku masyarakat

*Sumber: Olahan Data Peneliti, 2026*

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa WALHI NTT mampu menyesuaikan strategi berdasarkan karakter persoalan yang dihadapi. Pada konflik kebijakan, pendekatan advokasi lebih dominan; pada kasus pencemaran digunakan monitoring dan tekanan publik; sedangkan pada isu keseharian seperti sampah, strategi pendidikan dan perubahan perilaku menjadi prioritas. Fleksibilitas tersebut menunjukkan kapasitas WALHI sebagai organisasi masyarakat sipil yang responsif, strategis, dan relevan dalam menjawab krisis lingkungan di Nusa Tenggara Timur.

### **Pembahasan**

#### **Peran Strategis WALHI NTT dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Krisis Lingkungan**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa WALHI NTT memiliki posisi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap krisis lingkungan melalui fungsi konsultasi, fasilitasi, advokasi, dan monitoring. Keempat peran tersebut berjalan saling berkaitan dan membentuk proses perubahan sosial yang mendorong tumbuhnya kepedulian ekologis masyarakat. Dalam konteks ini, WALHI NTT tidak hanya hadir sebagai organisasi lingkungan, tetapi juga sebagai penggerak pendidikan publik dan partisipasi sosial.

Pertama, peran konsultasi sebagai dasar pembentukan kesadaran kritis. Peran konsultasi dilakukan melalui penyampaian informasi, pendidikan lingkungan, serta pendampingan masyarakat terhadap persoalan ekologis yang dihadapi. Program Sekolah Ekologi menjadi sarana utama dalam memberikan pemahaman mengenai perubahan iklim, hak atas lingkungan hidup, keadilan ekologis, serta dampak pembangunan terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa WALHI memandang persoalan lingkungan sebagai isu yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan kebijakan pembangunan. Konsultasi juga berlangsung secara dialogis melalui diskusi partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya menerima materi, tetapi dapat menyampaikan pengalaman dan persoalan lokal yang mereka alami. Pendekatan ini penting karena kesadaran lingkungan lebih mudah tumbuh melalui proses refleksi bersama dibandingkan komunikasi satu arah. Selain itu, fungsi konsultasi tampak dalam pendampingan kasus Geothermal Poco Leok dan pembangunan pabrik Elpiji di Bolok, ketika WALHI membantu masyarakat memahami hak ekologis serta posisi mereka dalam menghadapi tekanan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menjadi penerima informasi semata, melainkan mampu memahami dan menilai persoalan lingkungan secara mandiri.

Kedua, peran fasilitasi sebagai pendorong keterlibatan masyarakat. WALHI NTT berperan aktif menyediakan ruang, sarana, dan mekanisme agar masyarakat dapat terlibat dalam gerakan lingkungan. Bentuk fasilitasi diwujudkan melalui penyelenggaraan workshop, Sekolah Ekologi, diskusi publik, serta kunjungan ke sekolah dan kampus di Kota Kupang. Penyediaan ruang partisipasi ini penting karena rendahnya kesadaran lingkungan

sering kali dipengaruhi terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan ekologis. Selain itu, WALHI memanfaatkan media kampanye seperti poster, selebaran, media sosial, dan platform digital untuk memperluas jangkauan pesan lingkungan kepada generasi muda. Peran fasilitasi juga terlihat dalam kemampuan WALHI mengorganisasi aksi kolektif seperti Green Student Movement, kampanye Car Free Day, aksi bersih pantai, dan penanaman mangrove. Peran ini menunjukkan bahwa fasilitasi bukan sekadar menyediakan kegiatan, tetapi menciptakan ruang bersama yang mendorong masyarakat ikut terlibat dalam tindakan nyata. Kesadaran yang lahir melalui pengalaman langsung cenderung lebih kuat dan bertahan lama.

Ketiga, peran advokasi sebagai upaya perlindungan hak ekologis masyarakat. Advokasi dijalankan WALHI NTT pada dua tingkat, yaitu tingkat kebijakan dan tingkat komunitas. Pada tingkat kebijakan, WALHI secara konsisten mengkritisi proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan, seperti PLTU Timor Satu, Geothermal Poco Leok, dan pembangunan pabrik Elpiji di Bolok. Organisasi ini juga menyampaikan alternatif kebijakan berupa transisi energi terbarukan, penguatan AMDAL, dan pembangunan berkelanjutan. Pada tingkat komunitas, WALHI memperkuat suara kelompok rentan seperti masyarakat adat, nelayan, dan warga pesisir agar mampu memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat. Advokasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penolakan kebijakan, tetapi juga penguatan kemampuan masyarakat agar mampu menyampaikan kepentingannya sendiri secara kolektif. Dengan cara ini, masyarakat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi maupun kebijakan pembangunan.

Keempat, peran monitoring sebagai bentuk kontrol sosial dan evaluasi berkelanjutan. WALHI NTT menjalankan monitoring melalui pemantauan kondisi lingkungan, evaluasi dampak program, serta penyampaian hasil pengawasan kepada masyarakat. Dalam kasus PLTU Timor Satu, monitoring dilakukan terhadap kualitas udara dan dampak kesehatan masyarakat sekitar. Pada kasus lain, WALHI juga memantau dampak pembangunan terhadap wilayah adat, kawasan pesisir, dan ruang hidup masyarakat. Data lapangan yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar kegiatan advokasi dan kampanye publik. Selain pengawasan eksternal, WALHI juga melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan Program Sekolah Ekologi melalui penilaian tahunan. Evaluasi ini bertujuan memperbaiki metode pembelajaran, memperluas jangkauan peserta, dan menjaga keberlanjutan dampak program. Hasil monitoring disampaikan melalui media sosial, forum publik, dan siaran pers sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi lingkungan di daerahnya. Peran ini penting karena mendorong transparansi, tanggung jawab, dan pengawasan bersama terhadap persoalan lingkungan.

Secara keseluruhan, keberhasilan WALHI NTT dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terletak pada kemampuannya memadukan fungsi konsultasi, fasilitasi, advokasi, dan monitoring dalam satu gerakan sosial lingkungan. Pendekatan tersebut menjadikan masyarakat tidak hanya memahami persoalan ekologis secara teoritis, tetapi juga terdorong untuk ikut menjaga lingkungan melalui tindakan nyata. Dengan demikian, WALHI NTT berhasil menumbuhkan kesadaran lingkungan yang berpengaruh pada perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

### **Efektivitas Integrasi Strategi WALHI NTT dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan WALHI NTT dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bertumpu pada keterpaduan tiga strategi utama, yaitu Sekolah Ekologi, Kampanye Maklumat, dan pemberdayaan masyarakat melalui konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Ketiga strategi tersebut saling melengkapi karena menysasar aspek

pengetahuan, perubahan perilaku, serta penguatan kapasitas masyarakat secara bersamaan. Melalui pola ini, WALHI NTT tidak hanya membangun pemahaman lingkungan, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam tindakan nyata dan gerakan kolektif yang berkelanjutan.

Pertama, Strategi Sekolah Ekologi sebagai pusat pembentukan kesadaran kritis. Sekolah Ekologi menjadi strategi utama WALHI NTT dalam menanamkan pemahaman lingkungan secara mendalam kepada peserta. Program ini dirancang untuk membentuk cara pandang baru mengenai hubungan manusia dengan alam, dampak pembangunan, serta tanggung jawab sosial terhadap kelestarian lingkungan. Kesadaran yang dibangun tidak berhenti pada pengetahuan teoritis, tetapi diarahkan pada perubahan pola pikir dan kemauan bertindak. Dengan demikian, peserta didorong melihat persoalan lingkungan sebagai masalah bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

Kedua, pendekatan Green Student Movement (GSM) sebagai metode belajar berbasis pengalaman. Sekolah Ekologi dilaksanakan melalui metode Green Student Movement (GSM), yaitu pembelajaran yang menempatkan alam terbuka sebagai ruang belajar utama. Peserta tidak hanya menerima materi di dalam ruangan, tetapi diajak melakukan pengamatan lapangan, praktik langsung, dan diskusi reflektif berdasarkan kondisi nyata. Cara ini membuat peserta lebih mudah memahami hubungan antara persoalan sampah, pencemaran, perubahan iklim, dan kebijakan pembangunan. Pembelajaran berbasis pengalaman juga mendorong peserta untuk menemukan sendiri makna dari setiap materi yang diberikan, sehingga pemahaman menjadi lebih kuat dan membekas.

Ketiga, Kampanye Maklumat sebagai perluasan kesadaran ke ruang publik. Jika Sekolah Ekologi berfokus pada pembinaan peserta secara intensif, maka Kampanye Maklumat diarahkan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Strategi ini dijalankan melalui kampanye di ruang publik, media sosial, sekolah, kampus, dan komunitas masyarakat. Kehadiran WALHI di ruang publik memperlihatkan bahwa pendidikan lingkungan tidak hanya berlangsung dalam forum resmi, tetapi harus hadir di tengah aktivitas masyarakat sehari-hari. Pendekatan ini penting karena perubahan perilaku sosial membutuhkan penyampaian pesan yang luas dan berulang.

Keempat, kampanye berbasis aksi nyata sebagai pendorong perubahan perilaku. Kampanye Maklumat dilaksanakan melalui kegiatan yang mudah diikuti masyarakat, seperti ajakan membawa tumbler saat Car Free Day, penanaman mangrove di pesisir Oesapa Barat, aksi bersih pantai, dan pembagian bibit pohon. Kegiatan semacam ini membuat masyarakat tidak hanya mendengar pesan lingkungan, tetapi ikut terlibat langsung dalam tindakan sederhana yang bermanfaat. Pola tersebut lebih efektif karena masyarakat cenderung lebih mudah menerima nilai baru ketika disertai contoh nyata. Dengan demikian, kampanye tidak berhenti pada slogan, tetapi mendorong lahirnya kebiasaan yang lebih peduli lingkungan.

Kelima, Strategi Wilayah Kelola Rakyat (WKR) sebagai penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Strategi WKR dijalankan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga wilayah hidupnya. Pendampingan terhadap masyarakat adat Manggarai dalam kasus Geothermal Poco Leok dan nelayan Bolok menjadi contoh bahwa WALHI berupaya memperkuat kemampuan masyarakat memahami serta memperjuangkan hak ekologis mereka. Selain itu, pelatihan dan pendidikan lanjutan melalui komunitas Sahabat Alam membuat proses pemberdayaan tidak berhenti setelah program selesai. Tujuan akhirnya adalah membentuk masyarakat yang mampu mengenali, merespons, dan menyelesaikan persoalan lingkungan secara mandiri.

Keenam, pembentukan komitmen dan gerakan kolektif. Efektivitas strategi WKR juga terlihat dari tumbuhnya gerakan bersama yang lahir dari inisiatif masyarakat sendiri. Alumni

Sekolah Ekologi secara sukarela membagikan pengetahuan kepada teman kampus, terlibat dalam kegiatan kampanye, serta membantu pelaksanaan program berikutnya. WALHI juga membangun jejaring lintas kampus dan komunitas melalui Sahabat Alam sehingga kesadaran lingkungan menyebar ke berbagai wilayah di NTT. Kesadaran yang telah tumbuh kemudian diterjemahkan ke dalam aksi bersama seperti bersih pantai, penanaman mangrove, kampanye publik, dan advokasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak program tidak bersifat sementara, tetapi berkembang menjadi komitmen sosial jangka panjang.

Secara keseluruhan, efektivitas WALHI NTT terletak pada kemampuannya memadukan pendidikan lingkungan, kampanye publik, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu rangkaian gerakan yang saling menguatkan. Sekolah Ekologi membentuk pengetahuan dan kesadaran, Kampanye Maklumat memperluas pengaruh ke masyarakat umum, sedangkan WKR menjaga keberlanjutan melalui penguatan kapasitas warga. Melalui pola tersebut, WALHI NTT berhasil membangun gerakan lingkungan yang dekat dengan masyarakat dan memberi dampak jangka panjang terhadap perubahan sikap serta perilaku sosial.

### **Analisis Peran dan Strategi WALHI dalam Perspektif Teori Gerakan Sosial Baru**

Peran dan strategi WALHI NTT dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap krisis lingkungan dapat dipahami melalui Teori Gerakan Sosial Baru yang dikembangkan Alain Touraine (1978). Teori ini menjelaskan bahwa gerakan sosial modern tidak hanya berfokus pada tuntutan ekonomi atau konflik kelas, tetapi lebih menekankan pembentukan identitas kolektif, partisipasi warga, penguasaan ruang publik, serta perubahan nilai dalam masyarakat. Dalam konteks ini, WALHI NTT memperlihatkan karakter sebagai gerakan sosial yang berupaya membangun kesadaran ekologis melalui pendidikan, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pertama, pembentukan identitas sosial sebagai masyarakat peduli lingkungan. Salah satu ciri utama gerakan sosial baru adalah lahirnya identitas bersama yang menjadi dasar gerakan kolektif. Peran WALHI NTT melalui konsultasi, fasilitasi, advokasi, dan monitoring menunjukkan adanya proses pembentukan identitas baru pada peserta dan masyarakat sebagai individu yang peduli terhadap persoalan lingkungan. Program Sekolah Ekologi tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai bahwa peserta memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga lingkungan hidup. Identitas ini diperkuat melalui pembentukan komunitas Sahabat Alam yang menjadi ruang berhimpun bagi alumni dan relawan. Dalam komunitas tersebut, anggota saling berinteraksi, berdiskusi, dan menjalankan aksi bersama sehingga identitas sebagai pegiat lingkungan terus terpelihara. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Touraine bahwa gerakan sosial lahir ketika individu membangun kesadaran bersama di luar batas-batas sosial tradisional.

Kedua, mobilisasi kolektif melalui pendekatan partisipatif. Gerakan sosial baru bertumpu pada keterlibatan warga secara sukarela dan horizontal, bukan melalui struktur komando yang kaku. Hal ini tampak dalam cara WALHI NTT mengorganisasi masyarakat melalui metode yang partisipatif. Pada Program Sekolah Ekologi, setiap peserta diberi ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, dan terlibat dalam kegiatan lapangan. Tidak terdapat pembatasan status sosial, latar belakang kampus, maupun asal daerah. Pola ini memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antaranggota. Mobilisasi kolektif juga terlihat melalui jaringan alumni yang menyebarkan kembali nilai-nilai lingkungan di kampus dan komunitas masing-masing. Dengan demikian, WALHI tidak hanya menggerakkan peserta secara individual, tetapi membentuk jejaring sosial yang terus berkembang di berbagai wilayah NTT.

Ketiga, pemanfaatan ruang publik sebagai arena perjuangan sosial. Dalam pandangan Touraine, ruang publik merupakan tempat penting bagi masyarakat sipil untuk mengekspresikan kepentingan dan gagasan alternatif. WALHI NTT secara aktif memanfaatkan ruang publik fisik maupun digital sebagai media perjuangan lingkungan. Kampanye Maklumat di area Car Free Day, aksi bersih pantai, penanaman mangrove, diskusi kampus, dan kegiatan di sekolah menunjukkan bahwa WALHI membawa isu lingkungan langsung ke tengah masyarakat. Selain ruang fisik, WALHI juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi, kritik kebijakan, dan ajakan partisipasi. Pemanfaatan ruang publik ini penting karena menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari percakapan sosial yang lebih luas, bukan hanya urusan kelompok tertentu. Dengan kata lain, WALHI berhasil mengubah ruang publik menjadi arena pendidikan dan gerakan sosial lingkungan.

Keempat, perubahan sosial melalui transformasi nilai dan perilaku. Gerakan sosial baru tidak selalu diukur dari keberhasilan merebut kekuasaan politik, tetapi dari kemampuannya mengubah nilai, cara pandang, dan perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi WALHI NTT telah mendorong perubahan tersebut secara bertahap. Peserta program mulai memahami bahwa persoalan lingkungan berkaitan erat dengan pola hidup sehari-hari, kebijakan pembangunan, dan tanggung jawab bersama. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam aksi bersih lingkungan, penggunaan tumbler untuk mengurangi plastik sekali pakai, penanaman pohon, hingga keberanian masyarakat menyuarakan hak ekologis mereka. Transformasi nilai ini menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan mulai tumbuh sebagai norma sosial baru di tengah masyarakat.

Kelima, WALHI NTT sebagai representasi gerakan sosial lingkungan lokal. Berdasarkan temuan penelitian, WALHI NTT dapat dipandang sebagai bentuk nyata gerakan sosial baru di tingkat lokal. Organisasi ini tidak hanya bergerak menanggapi kerusakan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif, memperkuat partisipasi warga, dan menciptakan budaya sosial yang lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Keberadaan WALHI NTT menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat dimulai dari komunitas lokal melalui pendidikan, solidaritas, dan aksi bersama.

Secara keseluruhan, analisis dengan Teori Gerakan Sosial Baru memperlihatkan bahwa keberhasilan WALHI NTT bukan semata terletak pada banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi pada kemampuannya membangun identitas ekologis, memobilisasi masyarakat, memanfaatkan ruang publik, dan menanamkan nilai baru tentang pentingnya lingkungan hidup. Melalui proses tersebut, WALHI NTT telah berperan sebagai kekuatan sosial yang mendorong perubahan masyarakat menuju kehidupan yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

### **Implikasi Peran dan Strategi WALHI NTT terhadap Kesadaran Masyarakat pada Krisis Lingkungan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan strategi WALHI NTT memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai krisis lingkungan. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada bertambahnya pengetahuan masyarakat, tetapi juga pada perubahan sikap, perilaku, kemampuan bertindak, serta tumbuhnya gerakan kolektif yang berkelanjutan. Implikasi ini memperlihatkan bahwa kegiatan WALHI NTT tidak berhenti pada sosialisasi semata, melainkan menghasilkan perubahan sosial yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat.

Pertama, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan lingkungan. Peran konsultasi yang dijalankan melalui Sekolah Ekologi, diskusi publik, dan sosialisasi di kampus maupun sekolah telah memperluas cara pandang masyarakat tentang isu

lingkungan. Sebelum mengikuti program, sebagian peserta memandang masalah lingkungan hanya sebatas persoalan sampah dan kebersihan. Setelah memperoleh materi mengenai perubahan iklim, hak atas lingkungan hidup, konflik sumber daya alam, serta dampak pembangunan, masyarakat mulai memahami bahwa krisis lingkungan berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi, ketimpangan sosial, dan relasi kekuasaan. Perubahan ini menunjukkan terjadinya peningkatan kesadaran kognitif, yaitu kemampuan masyarakat memahami akar persoalan lingkungan secara lebih utuh.

Kedua, tumbuhnya keberanian dan kemandirian masyarakat untuk bertindak. Fungsi pendampingan yang dilakukan WALHI NTT membawa dampak pada meningkatnya keberanian masyarakat dalam menyuarakan kepentingan ekologis mereka. Pendampingan pada kasus Geothermal Poco Leok, PLTU Timor Satu, dan persoalan nelayan Bolok menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi berada pada posisi pasif sebagai pihak terdampak. Mereka mulai memahami hak-haknya, berani menyampaikan penolakan, serta terlibat dalam upaya perlindungan ruang hidup. Perubahan ini penting karena kesadaran lingkungan yang kuat harus diikuti kemampuan bertindak secara nyata. Dengan demikian, WALHI turut mendorong lahirnya masyarakat yang lebih mandiri dalam memperjuangkan kepentingan ekologisnya.

Ketiga, terbentuknya ruang partisipasi yang lebih inklusif. Peran fasilitasi yang dijalankan WALHI NTT melalui Sekolah Ekologi, kampanye publik, dan komunitas Sahabat Alam telah membuka ruang partisipasi bagi kelompok muda, mahasiswa, dan masyarakat umum. Program yang dilakukan secara terbuka memungkinkan siapa saja terlibat tanpa dibatasi latar belakang sosial, kampus, atau daerah asal. Implikasi dari kondisi ini adalah tumbuhnya jaringan partisipasi yang lebih luas dan beragam. Masyarakat tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi menjadi bagian dari komunitas yang memiliki tujuan bersama dalam menjaga lingkungan. Keberadaan ruang partisipasi semacam ini penting untuk memperkuat gerakan lingkungan di tingkat lokal.

Keempat, meningkatnya perubahan perilaku sehari-hari. Strategi Kampanye Maklumat menunjukkan dampak langsung terhadap perilaku masyarakat. Kampanye membawa tumbler, aksi bersih pantai, penanaman mangrove, dan ajakan memilah sampah menjadi contoh bahwa masyarakat mulai menerapkan nilai-nilai lingkungan dalam tindakan sederhana. Perubahan perilaku ini menandakan bahwa kesadaran yang dibangun tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi masuk ke kebiasaan hidup sehari-hari. Dalam jangka panjang, perubahan kecil semacam ini berpotensi menciptakan budaya sosial yang lebih ramah lingkungan.

Kelima, terbentuknya solidaritas dan gerakan kolektif. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR) menghasilkan dampak berupa meningkatnya solidaritas antarwarga dalam menghadapi ancaman ekologis. Pada masyarakat adat Poco Leok, warga mulai bersatu mempertahankan ruang hidup dari proyek yang dianggap merugikan. Pada komunitas nelayan Bolok, masyarakat semakin sadar pentingnya mempertahankan wilayah tangkap dari tekanan industri. Selain itu, alumni Sekolah Ekologi yang tergabung dalam Sahabat Alam terus menjalankan kegiatan kampanye, edukasi, dan aksi lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat telah berkembang menjadi gerakan bersama, bukan hanya kepedulian individu.

Keenam, meningkatnya kualitas advokasi berbasis data dan informasi. Peran monitoring yang dilakukan WALHI NTT melalui pemantauan lapangan, dokumentasi kasus, dan publikasi hasil pengawasan membawa dampak pada meningkatnya kualitas advokasi lingkungan. Data mengenai pencemaran udara, kerusakan pesisir, atau dampak pembangunan menjadi dasar yang kuat dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah dan pelaku usaha. Selain itu, masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai

kondisi lingkungan di daerahnya. Implikasi ini penting karena kesadaran publik akan lebih mudah tumbuh ketika didukung informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketujuh, lahirnya agen perubahan di tengah masyarakat. Salah satu dampak paling penting dari seluruh program WALHI NTT adalah munculnya individu-individu yang kemudian menjadi penggerak baru di lingkungannya masing-masing. Alumni Sekolah Ekologi banyak yang aktif menyebarkan pengetahuan kepada teman kampus, terlibat dalam aksi sosial, serta membantu kegiatan WALHI pada periode berikutnya. Mereka berperan sebagai perantara yang memperluas pengaruh gerakan lingkungan tanpa selalu bergantung pada organisasi induk. Hal ini menunjukkan adanya efek berantai yang memperbesar jangkauan program secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peran dan strategi WALHI NTT memberikan implikasi yang luas terhadap kesadaran masyarakat pada krisis lingkungan. Dampak tersebut terlihat pada peningkatan pengetahuan, keberanian bertindak, perubahan perilaku, penguatan solidaritas, serta munculnya kader-kader lingkungan baru. Dengan demikian, WALHI NTT tidak hanya menjalankan fungsi advokasi lingkungan, tetapi juga berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar, kritis, dan aktif menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa WALHI NTT memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap krisis lingkungan di Kota Kupang dan wilayah Nusa Tenggara Timur. Peran tersebut dijalankan melalui empat fungsi utama, yaitu konsultasi, fasilitasi, advokasi, dan monitoring. Peran konsultasi dilakukan melalui pendidikan lingkungan, diskusi, serta pendampingan masyarakat agar memahami persoalan ekologis secara lebih luas. Peran fasilitasi diwujudkan melalui penyediaan ruang belajar, pembentukan komunitas, dan pengorganisasian aksi lingkungan. Peran advokasi terlihat dalam upaya pembelaan hak masyarakat terdampak serta penyampaian kritik dan rekomendasi terhadap kebijakan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. Sementara itu, peran monitoring dijalankan melalui pengawasan kondisi lingkungan, pengumpulan data lapangan, evaluasi program, dan publikasi hasil pengawasan kepada masyarakat.

Strategi WALHI NTT dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu Sekolah Ekologi, Kampanye Maklumat, dan pemberdayaan masyarakat melalui konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Sekolah Ekologi menjadi sarana pendidikan lingkungan yang membentuk pemahaman kritis peserta melalui metode pembelajaran partisipatif berbasis pengalaman lapangan. Kampanye Maklumat dijalankan melalui ruang publik, media sosial, sekolah, kampus, dan aksi langsung seperti penanaman mangrove, kampanye pengurangan sampah plastik, serta aksi bersih lingkungan. Adapun strategi Wilayah Kelola Rakyat dilakukan melalui pendampingan masyarakat adat, nelayan, dan komunitas lokal agar mampu mempertahankan ruang hidup serta memperjuangkan hak ekologis mereka secara mandiri.

Implikasi dari peran dan strategi tersebut terlihat pada meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang krisis lingkungan, tumbuhnya keberanian menyuarakan kepentingan ekologis, perubahan perilaku sehari-hari yang lebih peduli lingkungan, serta terbentuknya solidaritas kolektif melalui komunitas Sahabat Alam dan jaringan alumni Sekolah Ekologi. Kesadaran masyarakat tidak hanya berkembang pada tingkat pemahaman, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata dan keterlibatan berkelanjutan dalam gerakan lingkungan. Dengan demikian, WALHI NTT terbukti berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih sadar, kritis, dan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, A. (2018). *Pengertian lingkungan hidup*. Jakarta, Indonesia: Penerbit XYZ.
- Apriandi, A. (2019). *Analisis peran WALHI dalam advokasi pencegahan eksploitasi kawasan karst oleh industri semen di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Penerbit ABC.
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur. (2021). *Statistik lingkungan hidup Nusa Tenggara Timur*. Kupang, Indonesia: BPS NTT.
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1992). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource*. New York, NY: Wiley.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York, NY: Continuum International Publishing Group.
- Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1990). Changing learner behavior through environmental education. *The Journal of Environmental Education*, 21(3), 8–21. <https://doi.org/10.1080/00958964.1990.10753743>
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Monroe, M. C. (2003). Two avenues for encouraging conservation behaviors. *Human Ecology Review*, 10(2), 113–125.
- Rahmad, A., & Savirani, S. (2020). *Gerakan sosial baru: Teori dan praktik*. Jakarta, Indonesia: Penerbit PQR.
- Simanungkalit, Y. B. (2024). *Peningkatan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sekitar di Desa Ajibuhara Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo*. Medan, Indonesia: Penerbit VWX.
- Stern, P. C. (2000). New environmental theories: Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. *Journal of Social Issues*, 56(3), 407–424. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00175>
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2023). *Metodologi penelitian: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit GHI.
- Touraine, A. (1978). *La voix et le regard*. Paris, France: Éditions du Seuil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Jakarta, Indonesia.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia NTT. (2020, December 17). Pendidikan Sahabat Alam hari kedua. Retrieved from <https://walhintt.org>
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia NTT. (2023). GSM: Pendidikan dasar lingkungan hidup guna mencetak kader muda pejuang ekologi. Retrieved from <https://walhintt.org>
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2022). Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia WALHI NTT. Retrieved from <https://walhi.or.id>
- Wahyudi, A., Anugerah, R., & Arif, M. (2021). *Politik lingkungan WALHI dalam kasus kabut asap di Riau*. Jakarta, Indonesia: Penerbit XYZ.